



Sidoarjo Local Government Strategy in Handling Homelessness

Strategi Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam Penanganan Gelandangan

Ahmad Riyadh Umar Bahlamar*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the strategy of the Social Service in overcoming the homeless and beggars in Sidoarjo Regency and to describe and analyze the constraints of the Social Service's strategy in overcoming the homeless and beggars in Sidoarjo Regency. This research is based on the fact that there are still many homeless people and beggars on the streets. This research method uses descriptive qualitative, data collection is done by conducting interviews, observation, and documentation. The technique of determining the informants used a purposive sampling technique. The technical analysis in this study is a qualitative analysis type that refers to the theory of Miles and Huberman. The results showed that the Strategy of the Social Service in Overcoming Homeless and Beggars in Sidoarjo Regency related to achieving the goals could be said to have not been fully successful, as evidenced by the large number of homeless and beggars roaming around, but regarding the provision of guidance after a raid by the Satpol PP, there were homeless and beggars who work and leave their previous activities. Meanwhile, the obstacles to the Social Service strategy in dealing with homeless people and beggars are the mindset that does not want to change for the homeless and beggars, a sense of laziness, and disobedience to the homeless and beggars when participating in the coaching program, and also from the people who still give them money to the community.

Keywords: Strategy, Government, Homeless, Beggars

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo serta mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala strategi Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya tunawisma dan pengemis di jalanan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *teknik purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah jenis analisis kualitatif yang mengacu pada teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas Sosial Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo terkait dengan pencapaian

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Noviyanti

Reviewed by:

Akbar Pandu Dwinugraha and
Rutiana Dwi Wahyunengseh

*Correspondence:

Ahmad Riyadh Umar

Bahlamar

riyadh_ub@umsida.ac.id

Published: 24 Oktober 2023

Citation:

Bahlamar, A. R. U. (2023).

Strategi Pemerintah Daerah
Sidoarjo dalam Penanganan
Gelandangan.

JKMP (Jurnal Kebijakan dan
Manajemen Publik). 11:2.

doi: 10.21070/jkmp.v11i2.1752

tujuan dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil, terbukti dengan banyaknya gelandangan dan pengemis yang berkeliaran, namun mengenai rezeki. pembinaan pasca penggerebekan Satpol PP, terdapat gelandangan dan pengemis yang bekerja dan meninggalkan aktivitas sebelumnya. Sedangkan kendala strategi Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis adalah pola pikir yang tidak mau berubah pada gelandangan dan pengemis, rasa malas, dan ketidaktaatan pada gelandangan dan pengemis saat mengikuti program pembinaan. dan juga dari masyarakat yang masih memberikan uangnya kepada masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintahan, Tunawisma, Pengemis

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih dihadapkan pada permasalahan terkait kemiskinan. Beberapa aspek yang dapat memicu masalah kemiskinan diantaranya aspek pendapatan, menurunnya angka kesehatan, buta huruf, kesehatan terhadap lingkungan yang buruk dan problematik mengenai gender (Priseptian & Primandhana, 2022). Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan pemerintah di suatu daerah dalam lingkup sosial ekonomi adalah kemiskinan itu sendiri (Oktaviana et al., 2021).

Dilihat dari empat faktor kemiskinan yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural dan kultural. Pertama, kemiskinan absolut adalah seseorang yang tidak dapat memenuhi pangan, sandang, papan, dan pendidikan bagi kehidupan dan bekerja. Kedua, kemiskinan relatif adalah situasi kemiskinan yang memiliki pengaruh atas regulasi pembangunan seluruh warga negaranya. Ketiga, kemiskinan struktural adalah kemiskinan individu yang mengakibatkan rasa malas bekerja sehingga individu tidak mampu merubah keadaan. Keempat, kemiskinan kultural adalah situasi yang muncul disebabkan kebiasaan berserah diri atas keadaan dan minim terhadap aktualisasi diri (Adawiyah, 2020).

Kehadiran pengemis di daerah adalah gambaran atas kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Djaafar et al., 2022). Permasalahan gelandangan dan pengemis muncul agar mendapatkan belas kasih dan meminta-minta kepada publik atas dasar kepentingan pribadi (Wijayanti & Kusdarini, 2022). Upaya dilakukan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis dalam meningkatkan kesejahteraan selaras dengan UU No.11 Tahun 2009 dan UU No.13 Tahun 2011 (Pemerintah RI, 2009, 2011). Pemerintah juga mengamanatkan bahwa kewajiban Negara menurut pasal 34 ayat 1 pada UUD 1945 guna memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pemerintah RI, 1945).

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1	Tahun 2016	27,76 juta	10,70%
2	Tahun 2017	26,58 juta	10,12%
3	Tahun 2018	25,67 juta	9,66 %
4	Tahun 2019	24,79 juta	9,22%
5	Tahun 2020	26.42 juta	2,8 %

Sumber: Diolah penulis (2023)

Berikut jumlah penduduk miskin di Indonesia sendiri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,76 juta orang dengan persentase sebesar 10.70 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2017 dengan jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,58 juta orang dengan persentase sebesar 10.12 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 dimana penduduk miskin mencapai 25,67 juta orang dengan persentase sebesar 9.66 persen, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019, penduduk miskin sebanyak 24,79 juta orang dengan persentase sebesar 9.22 persen. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26.42 juta dengan persentase sebesar 2.8 persen (bps.go.id, 2021).

Pada Kabupaten Sidoarjo problematik mengenai PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) masih belum ada habisnya (Andrianto, 2023; Miftakhurrokhmi & Rodiyah, 2022). PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki suatu hambatan dalam melakukan fungsi sosialnya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai (Pemerintah Provinsi Riau, 2018). Para gelandangan dan pengemis sendiri pada umumnya sering melakukan aksi kegiatannya pada stopan / lampu merah jalan raya, dan juga pada toserba-toserba yang berada di pinggir jalan raya yang dimana tempat tersebut strategis untuk mengemis (Liputan6.com, 2019; Miftakhurrokhmi & Rodiyah, 2022). Para gelandangan dan pengemis sendiri terlihat hanya berdiam diri, sambil menunggu belas kasihan orang lain untuk memberinya uang (Dana, 2023). Para gelandangan maupun pengemis sendiri ini ketika melakukan jam aksi mereka pada malam hari, yaitu berada pada pinggir jalan raya (Balipost.com, 2018; Inibaru.id, 2018; Rasyid, 2020). Hal, tersebut menyebabkan para pengendara terkadang tidak sengaja “menyenggol” para gelandangan dan pengemis, menciptakan kemacetan, dan kecelakaan (Sixwanda, 2013; Tribunmanado.co.id, 2020).

Kabupaten Sidoarjo masalah PMKS masih terus dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah PMKS setiap tahunnya. Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo sendiri dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabell
Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020

No.	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengemis	125	125	125	31	86
2	Gelandangan dan Gelandangan	102	273	273	26	90

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Tabel diatas membuktikan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sidoarjo cukup banyak. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki strategi yaitu dengan memberikan pemberdayaan bagi pelaku. Dalam hal tersebut, akan terwujud melalui program pembinaan untuk para gepeng. Salah satu program yang dilakukan oleh Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidokare. Kegiatan pembinaan bertujuan untuk para gepeng ini mempunyai bekal ketrampilan sehingga dapat mencari kerja atau membuat usaha.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sering melakukan razia bersama Satpol PP guna mengamankan para gepeng (gelandangan dan pengemis) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Setelah melakukan razia, para gelandangan dan pengemis diberikan pelatihan. Namun, setelah mendapatkan pelatihan serta bantuan di Liponsos para gelandangan dan pengemis tetap kembali lagi ke jalan. Kemudian, pihak dinas sosial sendiri memberikan sanksi yaitu apabila mereka kembali menjadi pengemis dan gelandangan akan dikurung satu minggu di Liponsos. Namun hal diatas terus berulang hingga saat ini.

Gelandangan maupun pengemis sendiri menjadi permasalahan yang cukup rumit dan menimbulkan sebuah citra buruk pada suatu daerah. Tidak hanya keberadaan mereka diberbagai tempat akan tetapi juga terkadang menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar. Jika tidak segera diatasi akan menimbulkan sebuah kerugian bagi masyarakat sekitar maupun pada citra Kabupaten Sidoarjo sendiri. Maka dari itu diperlukan upaya dari pihak pemerintah guna mengatasi masalah gelandangan maupun pengemis tersebut. Manfaat dari penelitian ini yaitu menambah pengetahuan terkait strategi dan peran dinas soisal dalam menangani para gelandangan di Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan untuk mengembalikan semangat para gelandangan dan pengemis agar memiliki ide kreatif serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti ingin menganalisis dan menjelaskan terkait Strategi Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo. Konsep dasar yang peneliti ambil yaitu Strategi menurut kooten dalam (Salusu, 2006).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian yang berlokasi di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun alasan peneliti, lokasi tersebut merupakan tempat pemberdayaan maupun sebagai pembimbing gelandangan dan pengemis yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Informan peneliti ini sebanyak enam orang diantaranya Kasi Perlindungan Sosial, Kasi Tuna Sosial, staff Bidang Rehabilitasi Sosial, beserta gelandangan dan pengemis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder serta mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperjelas ruang lingkup, fokus penelitian ini mengerucut pada Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan teori Model Strategi menurut Salusu dan menjelaskan kendala-kendala yang terjadi pada strategi yang dilakukan oleh Dinas tersebut. Peneliti menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) sebagai analisis datanya. Meliputi a) Kondensasi data, merupakan proses seleksi, abstraksi, penyerdehanaan, dan pembaharuan data terhadap catatan observasi dalam penelitian. b) Penyajian Data, sebuah penyusunan, penyatuan, dan menyimpulkan informasi. Penyajian data bertujuan guna menganalisis data secara mendalam. c) Penarikan Kesimpulan, kegiatan guna menyimpulkan data selaras dengan perumusan masalah peneliti angkat sehingga pada akhir tahapan dapat menyimpulkan secara utuh seluruh data yang telah peneliti peroleh (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dasar yang peneliti ambil yaitu Strategi menurut kooten dalam (Salusu, 2006) diantaranya Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi Pendukung Sumber Daya, dan Strategi Kelembagaan.

Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Corporate Strategy adalah suatu ketetapan jangka panjang untuk mencapai tujuan yang bersifat penting bagi organisasi. Strategi satu ini dipergunakan untuk mengatasi permasalahan di Kabupaten Sidoarjo khususnya gelandangan dan pengemis. Corporate Strategy yang dilakukan selaras dengan misi dari Bupati Kabupaten Sidoarjo yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Didukung pula oleh Misi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, dan PMKS. Pemberdayaan tersebut hadir untuk memperdayakan fakir miskin terfokus pada bidang ekonomi. Melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin tentu memerlukan kebijakan, strategis, dan program yang berdampak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan social sendiri merupakan salah satu program dari dinas sosial. Selama proses rehabilitasi sosial para penerima manfaat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan berbagai ketrampilan sesuai dengan bakat dan ketrampilannya. Sesuai dengan prinsip keadilan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan system ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Gelandangan dan pengemis muncul disebabkan individu yang malas bekerja dan hanya mengandalkan rasa belas kasihan dari orang disekitarnya dengan cara meminta-minta, dan pola pikir dengan cara meminta-minta justru lebih mendapatkan hasil yang lebih banyak dibandingkan mereka bekerja. Karena dengan cara meminta-minta lebih mudah dilakukan dibandingkan bekerja. Rasa pasrah akan keadaan dan tidak mau merubah nasib mereka sendiri dan mencoba untuk berusaha dengan cara lain selain meminta-minta.

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi gelandangan dan pengemis yaitu dengan memberikan program yang melibatkan lini sektor UPT maupun UPTD. UPT/UPTD tersebut akan memberikan pelaku atau gepeng akan mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk merubah kehidupannya sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak.



Gambar 1. UPT PSBR Jombang
Sumber: dinsos.jatimprov.go.id. Diakses (2023)

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan UPT PSBR Jombang (UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja) yakni memberikan pelayanan kepada remaja yang putus sekolah (usia 18-23 tahun) akibat faktor ekonomi. Pelatihan yang diberikan di UPT PSBR Jombang diantaranya otomotif, menjahit, dan tata rias. Pelatihan yang diberikan di UPT PSBR Jombang diantaranya otomotif, menjahit, dan tata rias.

Berikutnya, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pasuruan adalah tempat bagi mereka yang telah lanjut usia (lansia). Disana lansia diberikan tempat layak dan baik untuk bertempat tinggal sehingga dapat menikmati hari tua yang diliputi kebahagiaan dan juga ketentraman lahir dan juga batin. Pelayanan yang diberikan adalah dengan memberikan pendampingan psikologis, memberikan edukasi, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala yang bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup sehat dan sejahtera bagi para lanjut usia (lansia).

Tabel 2. Pelatihan di UPTD Liponsos Sidokare

No.	Bulan/Tahun	Jenis Pelatihan	Keterangan	Jumlah
1.	Juni 2019	Menjahit	Tuna Daksa	20 orang
2.	November 2019	Tata Boga	Tuna Grahita	20 orang

Sumber : Hasil Olah peneliti (2023)

Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi program dapat memperlihatkan dampak negatif maupun positif atas strategi yang dilaksanakan oleh organisasi. Berkaitan dengan pelaksanaan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi gelandangan dan pengemis. Program yang dilakukan seperti pembinaan mental, agama, hingga ketrampilan sebagai upaya membantu gelandangan dan pengemis dalam mengembangkan potensinya. Namun dengan banyaknya program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo kurang efektif, sehingga masih terkukung pola pikir ataupun *mindset* yang lebih memilih kembali mengemis. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara oleh Dewi sebagai staff Bidang Rehabilitasi Sosial.

“Mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo memerlukan beberapa program diantaranya program pembinaan mental, agama, dan ketrampilan dimana hal ini dilakukan di tempat rujukan yaitu UPT dan UPTD. Untuk pembinaan mental ini sendiri kita berupaya untuk mengubah pola pikirnya. Meskipun dirasa agak sulit, karena mindset ini sendiri sudah menempel dalam kehidupan sehari-hari mereka,” (wawancara, 22 Juli 2023).

Pembinaan mental adalah salah satu program pembinaan terkait larangan mengemis dan bagaimana Islam memuliakan para umat selaras dengan norma dan syari’at agama. Program pembinaan mental yang dilaksanakan belum berdampak bagi para gelandang dan pengemis

sehingga strategi program untuk mengatasi hal tersebut belum tercapai dengan baik. Seperti penuturan wawancara Dewi sebagai staff Bidang Rehabilitasi Sosial.

“Para gelandangan dan pengemis ini memiliki mindset atau pola pikir meminta-minta dan tidak mau berusaha untuk merubah keadaan mereka sendiri. Maka dari itu diperlukan suatu usaha yang maksimal untuk memberikan pengertian bahwa kegiatan meminta-minta ataupun mengemis adalah kegiatan yang tidak baik untuk kehidupan mereka selanjutnya,” (wawancara, 22 Juli 2023).

Minimnya pola pikir para gelandangan dan pengemis yang lebih mudah mendapatkan uang melalui cara mengemis daripada bekerja. Kemudian, rasa malas juga menjadi faktor penghambat para gelandangan dan pengemis untuk mencari pekerjaan yang baik dan layak. Sriasih selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial berharap bahwa adanya kegiatan pembinaan mental ini dapat merubah mindset para gelandangan dan pengemis agar memiliki rasa malu atas kegiatannya. Pelatihan mental tersebut, juga berupaya untuk menjaga imun para pengemis dan gelandangan dengan diadakannya kegiatan senam bersama.



Gambar 2. Pelatihan Mental di UPTD Liponsos Sidokare

Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resources Support Strategy*)

Strategi ini akan memusatkan perhatian dengan cara memaksimalkan sumber-sumber esensial untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Adapun faktor-faktor yang dapat dilihat meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Hal ini senada dengan Sriasih selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.

“Faktor yang paling mendukung adalah faktor sumber daya baik sumber daya manusia yaitu tenaga, materi, dan lain sebagainya. Contohnya sendiri Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP mengadakan razia guna menertibkan para gelandangan maupun pengemis yang berkeliaran di jalan,” (wawancara, 22 Juli 2023)

Perlindungan Sosial, Kasi Perlindungan Sosial, Kasi Tuna Sosial, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan suatu program erat kaitannya dengan pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis dan sebagai penanggung jawab adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, untuk masing-masing program yang sedang berjalan akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT)/Unit Pelayanan Teknis Daerah UPTD yang telah menjadi tempat rujukan.

Tabel 3. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Jumlah Dana
1.	2019	Rp. 5.000.000
2.	2020	Rp. 3.000.000
3.	2021	Rp. 3.000.000

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Kedua, anggaran yang menjadi salah satu hal yang dilimpahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan insentif berupa dana perjalanan bagi pengangkutan para gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP. Satpol PP melakukan pengamanan untuk penangkapan para pelaku/gepeng merupakan salah satu upaya dalam strategi dalam mengatasi gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini sendiri berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan juga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Dalam mengatasi permasalahan tersebut tentu memerlukan peran banyak stakeholder diantaranya pemerintah, tokoh agama, dan ahli psikolog.

Strategi Kelembagaan (*Institusional Kelembagaan*)

Fokus dari strategi adalah dengan cara mengembangkan gagasan strategis untuk melakukan inovasi-inovasi strategi, inisiatif strategi dengan program sosialisasi. Strategi ini memiliki fungsi sebagai faktor penting bagi tersusunnya rapi dan dapat diterapkan sebaik-baiknya. UPTD Liponsos Sidokare sebagai instansi milik dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memberikan suatu sosialisasi dimana bekerja sama dengan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sriasih selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu lembaga yang hadir ditengah masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi psikososial keluarga. LK3 sendiri menyasar kepada keluarga yang membutuhkan suatu pelayanan informasi, konsultasi, pendampingan, dan juga perlindungan. Program sosialisasi juga digencarkan untuk para pengemis dan gelandangan hingga masyarakat. Masyarakat dilibatkan karena masih saja memberikan uang kepada para pengemis dan gelandangan.

Faktor-faktor yang Menghambat Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Sidoarjo

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah gelandangan dan pengemis. Adanya pola pikir atau *mindset* yang dimiliki para gelandangan dan pengemis diantaranya rasa malas merubah nasib. Hal itu, tentu menjadi salah satu faktor penghambat pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program-program dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun program pembinaan mental guna mengubah *mindset* para gelandangan dan pengemis.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki hambatan dalam memberikan program-program terhadap para gelandangan dan pengemis. Diantaranya minimnya pengamanan sehingga banyak gelandangan dan pengemis yang kabur dari tempat pembinaan. Lapangan pekerjaan yang terbatas juga sebagai pemicu utama munculnya gelandangan maupun pengemis.

3. Faktor Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah cara yang dapat digunakan guna mengendalikan seseorang atas peraturan tertentu. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis menjadi salah satu faktor penghambat pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program-programnya. Adapun Peraturan Daerah yang ada saat ini hanya terkait ketertiban umum dan pasal-pasal pemenuhan hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas mengenai Strategi Dinas Sosial dalam Mengatasi Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Sidoarjo dan menyandingkan dengan kenyataan di lapangan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Strategi Organisasi (Corporate Strategy) yang dalam mengatasi gelandangan dan pengemis sendiri, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini berkolaborasi dengan UPT maupun UPTD dimana dalam pelaksanaan program pembinaan ini sendiri dilakukan di UPT maupun UPTD setempat. Pembinaan berupa pemebrian skill yang bermanfaat untuk kehidupan kedepannya. Program Strategi (Strategy Program) diantaranya program pembinaan mental, agama, dan keterampilan bagi para gelandang dan pengemis. Kegiatan pembinaan bertujuan untuk membuat para gelandang dan pengemis siap bekerja dan tidak kembali meminta-minta. Strategi Pendukung Sumber Daya (Resources Strategy) dengan adanya sumber daya manusia dan anggaran telah dimaksimalkan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Strategi Kelembagaan (Institusional Strategy) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi maupun penyuluhan untuk mengatasi permasalahan terkait gelandangan dan pengemis. Sosialisasi maupun penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo beserta UPTD Liponsos Sidokare yakni dengan berupaya mengubah pola pikir dan sikap pelaku secara bertahap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel ini dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43–50. <https://doi.org/2721-6918>
- Andrianto, H. G. (2023). *Sistem Informasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Kabupaten Sidoarjo*. [Politeknik Negeri Jember]. <https://sipora.polije.ac.id/id/eprint/19421>
- Balipost.com. (2018). *Ditabrak Sepeda Motor Pengemis Tewas*. <https://www.balipost.com/news/2018/12/03/62719/Ditabrak-Sepeda-Motor-Pengemis-Tewas.html>
- bps.go.id. (2021). *Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>
- Dana, D. G. K. (2023). *Mengharapkan Belas Kasih dari Orang Paling Dermawan*. <https://www.detik.com/bali/bisnis/d-6673119/mengharapkan-belas-kasih-dari-orang-paling-dermawan>
- Pemerintah Provinsi Riau. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*. https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=514&Itemid=174
- Djaafar, L., Wantu, S., Lukum, R., & Hamid, S. Al. (2022). Peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Menangani Pengemis di Kota Gorontalo. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(4), 1553. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i4.1101>
- Inibaru.id. (2018). *Mitos Pengemis Tanjakan Krumput Banyumas; Kalau Nggak Dikasih Uang, Risiko Kecelakaan*. <https://inibaru.id/hits/mitos-pengemis-tanjakan-krumput-banyumas-kalau-nggak-dikasih-uang-risiko-kecelakaan>
- Liputan6.com. (2019). *Pengemis dan Gelandangan Berkeliaran di Lampung Merah Cirebon*. <https://www.liputan6.com/regional/read/3880847/pengemis-dan-gelandangan-berkeliraran-di-lampung-merah-cirebon>
- Miftakhurrohmi, M., & Rodiyah, I. (2022). Coordination between Actor in Handling Homeless People in Sidoarjo Regency. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20, 1–10. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v20i0.1284>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook (Third edit)*. SAGE Publications, Inc
- Oktaviana, D., Primandhana, W. P., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran, Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun. *Syntax Idea*, 3(5). <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/1183>
- Pemerintah RI. (1945). *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. DPR RI. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Pemerintah RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39223/uu-no-13-tahun-2011>
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 4(2), 45–53. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>
- Rasyid, S. (2020). *Termasuk Daerah “Rawan”, Ini 5 Fakta Fenomena Pengemis di Desa Pageralang Banyumas*. <https://www.merdeka.com/jateng/daerah-rawan-kecelakaan-ini-5-fakta-fenomena-pengemis-di-desa-pageralang-banyumas.html>
- Salusu, J. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sixwanda, A. P. (2013). *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di UPTD Liponos Sidokare)* [Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur]. <http://eprints.upnjatim.ac.id/4918/1/file1.pdf>
- Tribunmanado.co.id. (2020). *Dihantam Mobil, Ibu Tewas dan Pengendara Menangis Histeris*. <https://manado.tribunnews.com/2020/09/26/kecelakaan-maut-keluarga-pengemis-dihantam-mobil-ibu-tewas-dan-pengendara-menangis-histeris>
- Wijayanti, D. P., & Kusdarini, E. (2022). Penanggulangan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten. *E-Civics*, 11(4). <https://doi.org/421-436>

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright ©2023 Ahmad Riyadh Umar Bahlamar. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.